



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

LAPORAN KINERJA (LKj)



**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon 45113**

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2021

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

Cirebon , 14 Januari 2022

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan



Muklis

Disusun oleh :

Ketua Tim,
Sub Koordinator Tata Usaha

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' and 'S'.

Vera Utami Santoso

KATA PENGANTAR

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKT Tahun 2021, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2021 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2021 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024.

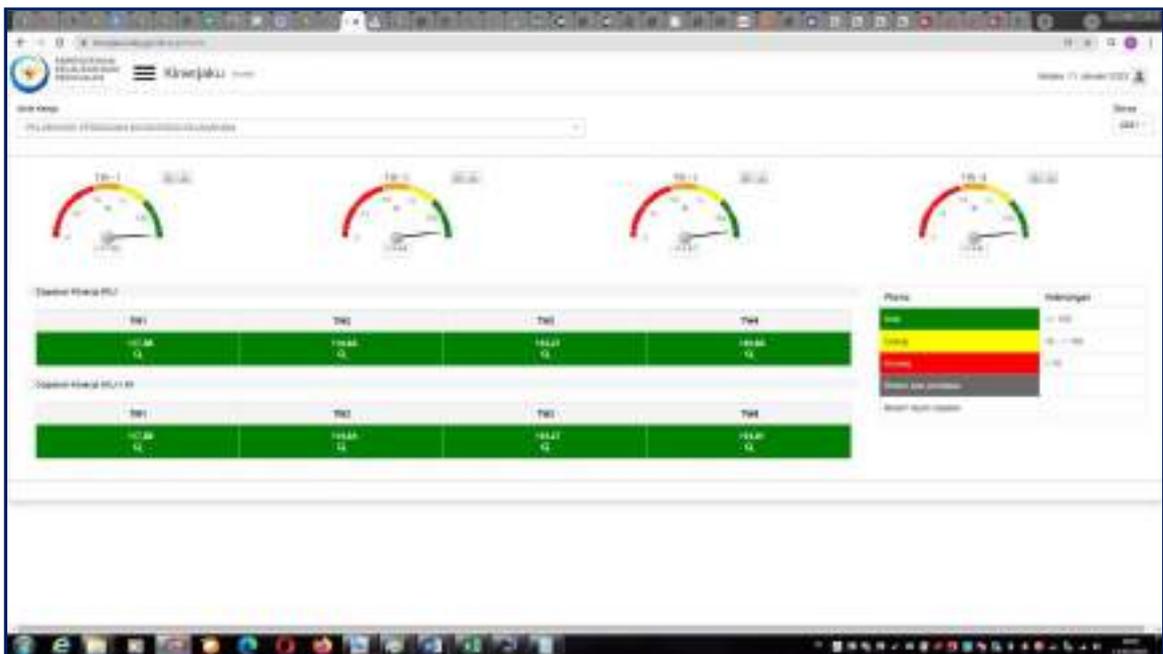
Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2021 ini disertai dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2021 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada Tahun 2021.

Tim Penyusun

RINGKASAN Eksekutif

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran **Rp 12.084.369.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 11.940.808.587,-** atau **98,81%** dari total pagu Tahun 2021. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,91%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan IV Tahun 2021 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 14 (empat belas) indikator sebagai berikut :

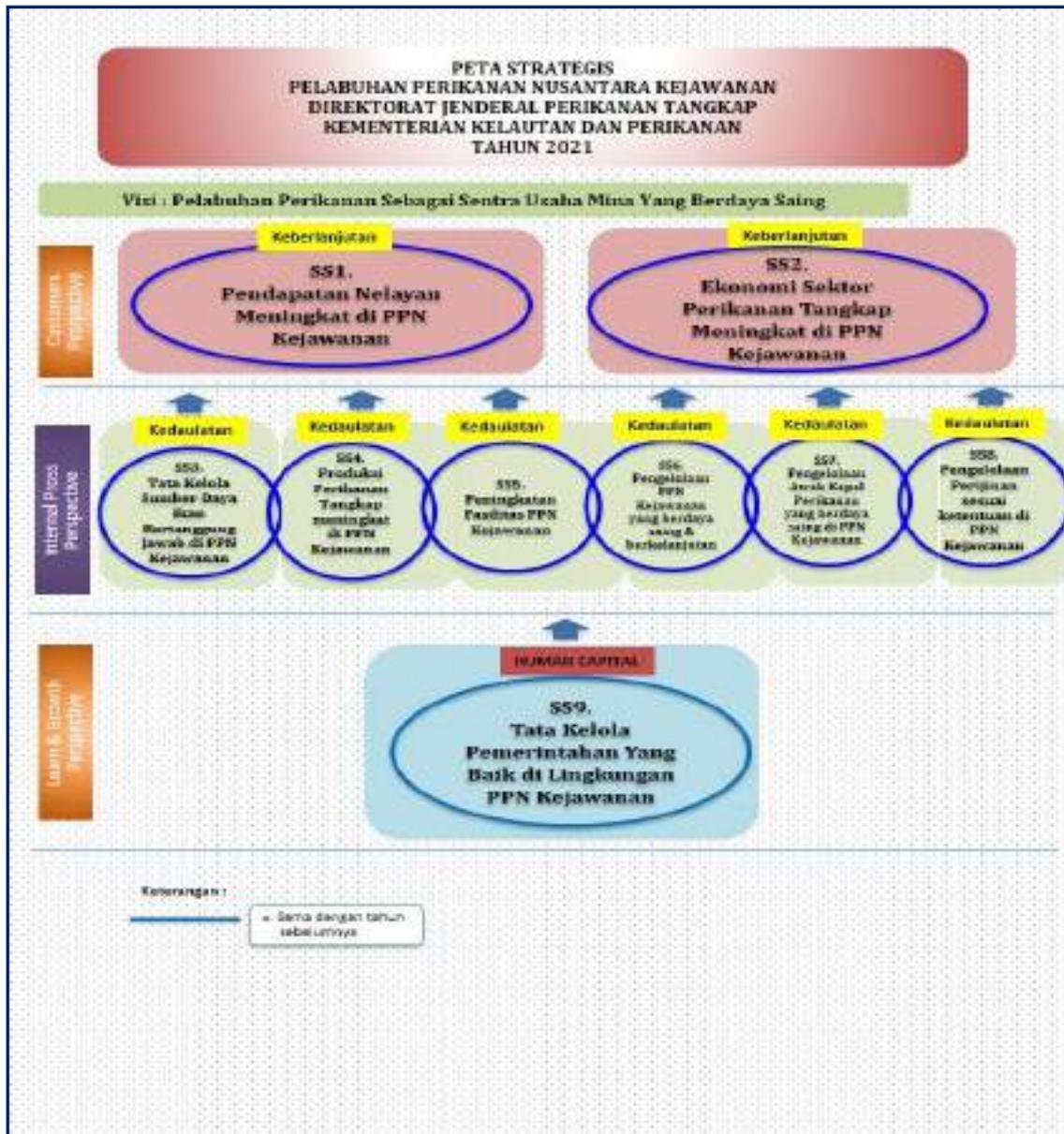
1. IK1 – Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)
2. IK2 – Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
3. IK3 – Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)
4. IK4 – Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)
5. IK5 – Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)
6. IK6 – Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
7. IK7– Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)
8. IK8 – Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
9. IK9 – IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)
10. IK10 – Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)
11. IK11 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)
12. IK12– Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
13. IK13– Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
14. IK15 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)

Selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu :

1. IK14 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan Tahun 2021 dapat disajikan pada diagram di bawah ini.



Gambar 2. Dashboard Peta Strategis Tahun 2021 pada Aplikasi Kinerja

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. SDM PPN Kejawanan	6
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Dan Misi Pembangunan Perikanan Tangkap	9
B. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2021	14
C. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	49
LAMPIRAN	
- SK TIM PENYUSUNAN LAKIP TA 2021	
- MANUAL IKU	
- PERJANJIAN KINERJA TA 2021	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity). Oleh karena itu, didalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang disusun setiap tahun.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif pelaksanaan pembangunannya mulai tahun anggaran 1994/1995. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia, di mana sumber anggaran berasal dari APBN, APBD, ZEEI dan OECF.

Dalam pelaksanaan pembangunannya diprioritaskan pada Fasilitas Pokok seperti Penahan Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 1997 di operasionalkan dengan status Uji Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan fasilitas yang masih minim.

Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon diupayakan untuk mewujudkan harapan, menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota Udag, Pusat kegiatan perikanan di Pantai Utara bagian Timur Propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon cukup mempunyai potensi untuk mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat dari segi potensi perikanan maupun dari segi pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan, perhubungan/transportasi, telekomunikasi, listrik, Air PDAM, sumberdaya manusia dan lain-lain.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanaan; dan/atau keimigrasian.

2. Fungsi pengusaha yaitu fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

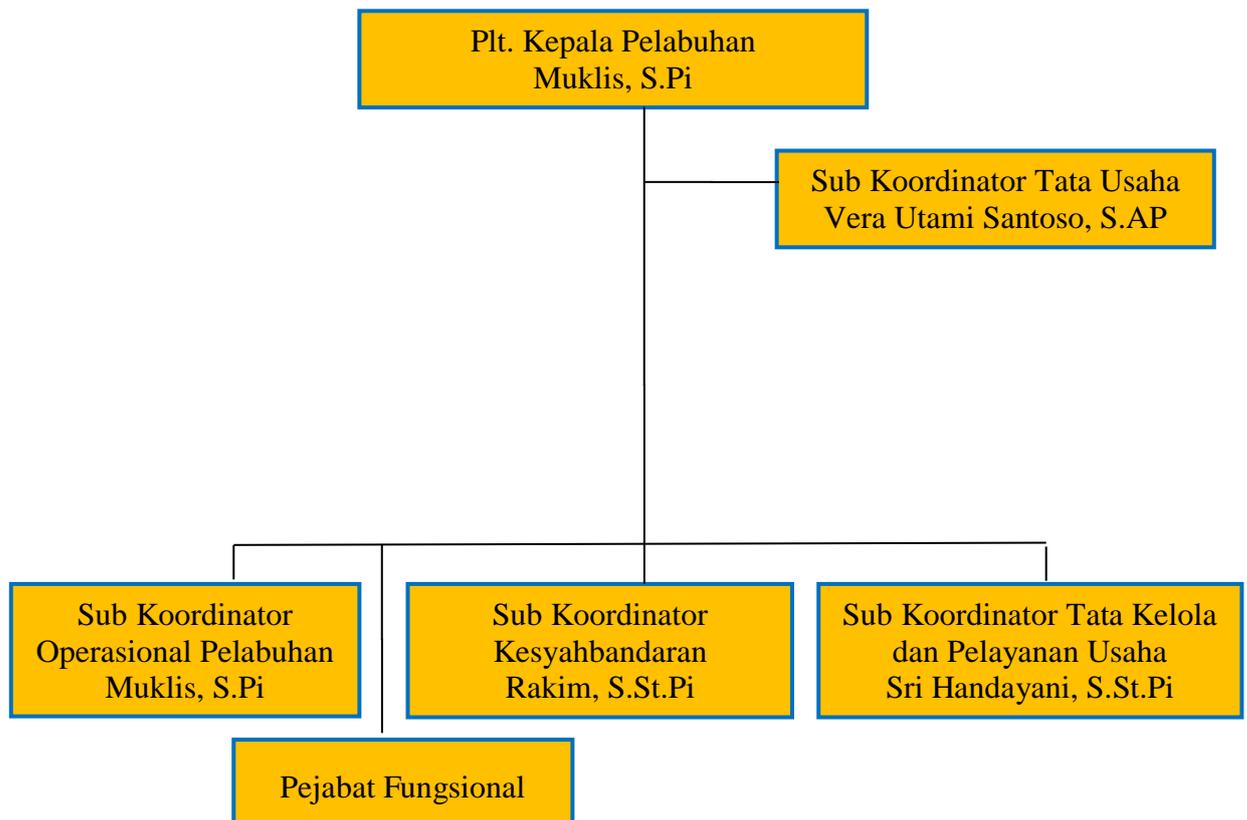
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanon sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 39/PERMEN-KP/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanon merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Seksi Operasional dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
2. Seksi Kesyahbandaran, dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Sub koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

4. Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan terdiri dari Pranata Komputer (Muda), Statistisi (Penyelia), Analis Mutu Hasil Perikanan dan Pengawas Perikanan Ahli (Pertama), Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) serta Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T-Pemula).



Gambar 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

E. SDM PPN Kejawanan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di dukung oleh 60 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 45 orang dan Pramubakti sebanyak 16 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	-	-
2.	Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha	-	-	1	-	1
	- Subbagian Tata Usaha	1	6	4	-	11
3.	Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	- Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	2	3	-	5
4.	Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	- Seksi Operasional Pelabuhan	-	2	1	1	4
5.	Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	- Seksi Kesyahbandaran	-	-	5	-	5
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	- Statistisi (Penyelia)	-	-	-	-	-
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	1	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	4	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	1	-	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	2	-	-	2
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1

	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	1	-	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	-	1	-	-	1
7.	Pegawai Pramubakti	16	-	-	-	16
Jumlah		17	15	26	-	59

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	-	-	1	-	-	-	1
	- Subbagian Tata Usaha	-	-	2	-	8	1	11
3.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	-	-	1
	- Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	2	-	3	-	5
4.	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	-	-	1
	- Seksi Operasional Pelabuhan	-	1	1	-	2	-	4
5.	Kepala Seksi Kesyahbandaran	-	-	1	-	-	-	1
	- Seksi Kesyahbandaran	-	-	4	-	1	-	5
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-
	- Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	-	-	1
	- Statistisi (Penyelia)	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	1	-	-	-	1
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Pertama)	-	-	4	-	-	-	4
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	-	-	-	-	1	-	1
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	-	-	-	-	2	-	2
	- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	1
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	-	-	1	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	-	-	1	-	-	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	-	-	-	1	-	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	-	-	-	1	-	-	1
7.	Pegawai Pramubakti	-	-	6	1	9	-	16
Jumlah		-	-	28	3	26	1	59

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Triwulan IV Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	-	1
	- Subbagian Tata Usaha	11	10	1
3.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
	- Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	5	5	-
4.	Kepala Seksi Operasional Pelabuhan	1	1	-
	- Seksi Operasional Pelabuhan	4	3	1
5.	Kepala Seksi Kesyahbandaran	1	1	-
	- Seksi Kesyahbandaran	5	5	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	- Pranata Komputer (Muda)	1	1	-
	- Statistisi (Penyelia)	-	-	-
	- Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir	1	1	-
	- Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pertama)	4	2	2
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Pemula)	1	1	-
	- Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Terampil)	2	2	-
	- Asisten Pengelolaan Keuangan APBN Ahli (Pertama)	1	1	-
	- Pranata Keuangan APBN (Mahir)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian Ahli (Pertama)	1	-	1
	- Analis Kepegawaian (Pelaksana/Terampil)	1	-	1
	- Pranata Humas (Terampil)	1	-	1
7.	Pegawai Pramubakti	16	14	2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		59	47	12
% tase Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin		100,00	79,66	20,33

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan S/d Triwulan IV Tahun 2021. Capaian Kinerja (*Performance Results*) S/d Triwulan IV Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut :

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Triwulan IV Tahun 2021.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran..

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Nasional

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2020-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Visi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Menkuatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial

- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukuna Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis

- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. **Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan

- b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
2. **Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
4. **Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Kejawanan Cirebon merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Cirebon sepanjang garis pantai 7 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan dimasa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Kejawanan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang di pasarkan sangat mahal. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat

Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan pula adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Kejawanan Cirebon.
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu di alokasikan pada PPN Kejawanan Cirebon.
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus di usahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk meguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Kejawanan Cirebon adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, perbulan maupun pertahunnya di Kota Cirebon.
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan didaerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari diharapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut.
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Cirebon melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan

dapat menyerap tenaga kerja di kota Cirebon sendiri, sebagai contoh, Pekerja dalam bidang Pengasinan, Penyortiran, Pembersih, Pengeringan dan lain-lain. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di areal PPN Kejawan Cirebon maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.

8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Steakholder yang ada di Kota Cirebon untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahnya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

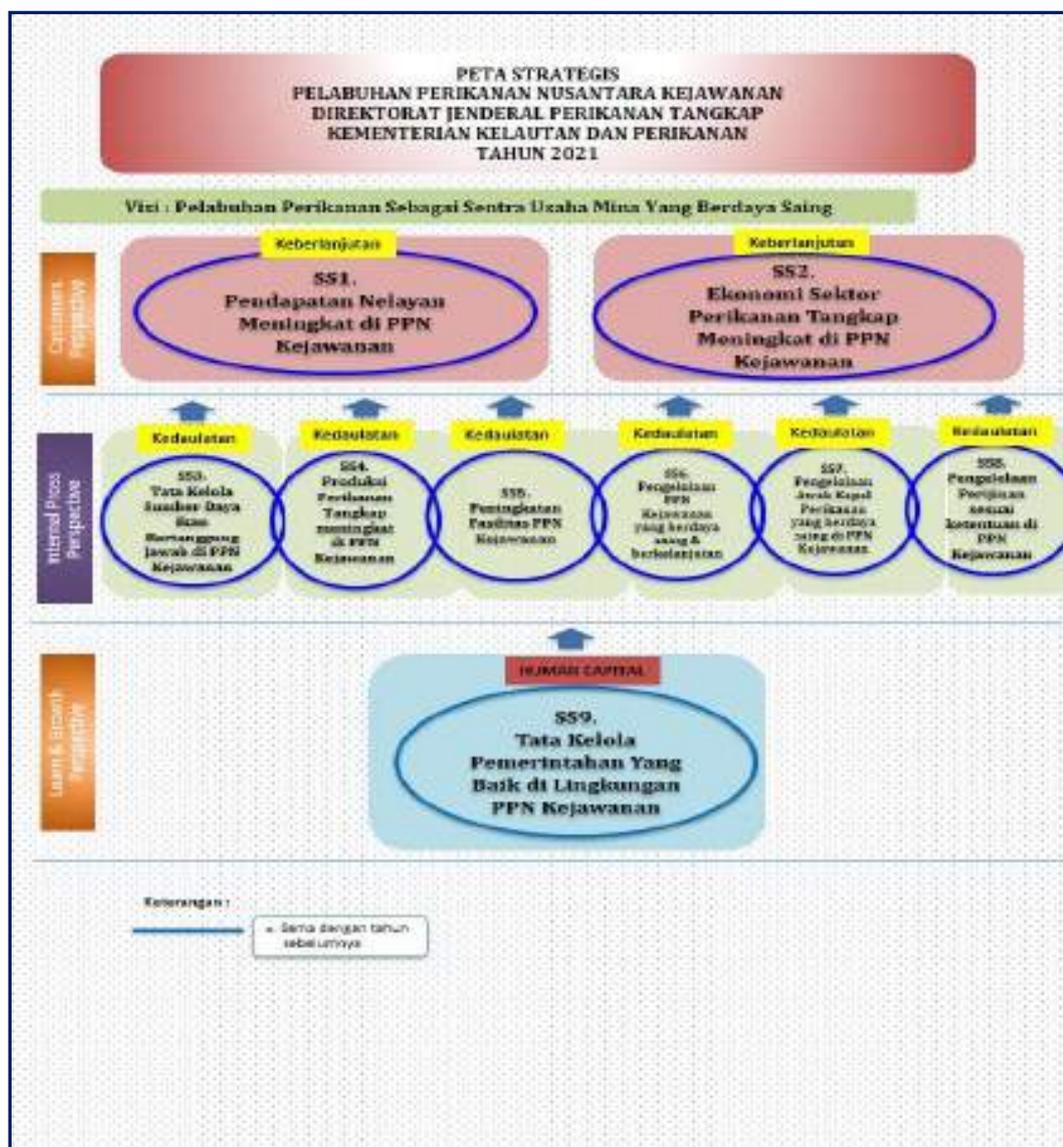
1. Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan), dengan indikator output :
 - Persentase pemenuhan informasi permodalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (persen)
2. Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Rp. Juta), dengan indikator output:
 - Jumlah pemenuhan laporan pelayanan PNBP di PPN Kejawan (dokumen);
3. Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan, dengan indikator output:
 - Jumlah laporan yang dikumpulkan dan diverifikasi data logbook penangkapan ikannya;

4. Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan, dengan indikator output :
 - Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (dokumen);
5. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator output :
 - Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (dokumen)
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen), dengan indikator output:
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Seksi Operasional (%);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Seksi Kesyahbandaran (%);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (%);
 - Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Sub Bagian Tata Usaha (%);
7. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator output:
 - Persentase pemenuhan informasi pengawakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (%);
8. Pengelolaan Perijinan sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase kapal perikanan yang berijin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (%);
9. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks), dengan indikator output :
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

- b. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai), dengan indikator output :
- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Akuntabilitas
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai), dengan indikator output :
- Persentase Pemenuhan dokumen PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen) Sub Bagian Tata Usaha
 - Persentase Pemenuhan dokumen PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen) Seksi Kesyahbandaran
 - Persentase Pemenuhan dokumen PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen) Seksi Operasional Pelabuhan
 - Persentase Pemenuhan dokumen PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
- d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen), dengan indikator output :
- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
 - Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
 - Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
- e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen), dengan indikator output :
- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 - Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);

- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
 - Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
- f. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuan Perikanan Nusantara Kejawan (nilai)
- g. Nilai IKPA Pelabuan Perikanan Nusantara Kejawan (nilai)

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan misi keberlanjutan, yakni keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan keberlanjutan sumber daya ikan. Sasaran strategis dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap disajikan dalam gambar peta strategis sebagai berikut :



Gambar 4. Rancangan Peta Strategi PPN Kejawanan Tahun 2021

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level II kepada bawahan (Level III), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level II kepada bawahan (Level III)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / CASCADING
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (nelayan)	Nelayan	5	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Kesyahbandaran
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2 Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.445	Triwulan	Akumulasi	Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Sub Bagian Tata Usaha
3	Tata Kelola Sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3 Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	Laporan	60	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Seksi Kesyahbandaran
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4 Jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	3.930	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5 Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	Unit	1	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Tata Kelola & Pelayanan Usaha
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	81	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan Seksi Kesyahbandaran Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Subbag Tata Usaha
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7 Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	Orang	15	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Kesyahbandaran
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	75	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Kesyahbandaran
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	73	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subbag Tata Usaha
		10 Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	75,07	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan Seksi Kesyahbandaran Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Subbag Tata Usaha
		11 Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	85,15	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan Seksi Kesyahbandaran Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Subbag Tata Usaha

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB / CASCADING
		12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	72,5	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subbag Tata Usaha
		13 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	72,5	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Subbag Tata Usaha
		14 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	86	Tahun	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan Seksi Kesyahbandaran Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Subbag Tata Usaha
		14 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Nilai	89	Semester	Nilai Posisi Akhir	Seksi Operasional Pelabuhan Seksi Kesyahbandaran Seksi Tata Kelola dan Pel. Usaha Subbag Tata Usaha

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan DIPA Awal Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan senilai Rp. 12.084.369.000,- sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 mengalami revisi antara lain :

1. Pada bulan Juni TA. 2021 Satker PPN Kejawanan mengalami revisi Pemotongan Belanja Pegawai sebesar Rp.721.221.000,- (pagu tunjangan kinerja) dengan DIPA Petikan Nomor SP.DIPA-032.03.2.622482/2021 tanggal 02 Juni 2021 Digital Stamp.2498.0280.9863.4258 yang semula pagu anggaran sebesar Rp.13.625.678.000,- menjadi Rp.12.904.457.000,-;
2. Pertengahan Bulan Juli Tahun 2021 PPN Kejawanan mengalami refocusing anggaran sebesar Rp.345.088.000,- dari nilai Pagu Anggaran DIPA 2021 sebesar Rp.12.904.457.000,- menjadi Rp.12.559.369.000,-;
3. Pertengahan Bulan Agustus Tahun 2021 PPN Kejawanan mengalami refocusing anggaran sebesar Rp.475.000.000,- (refocusing gaji dan tunjangan) dari nilai Pagu Anggaran DIPA 2021 sebesar Rp.12.559.369.000,- menjadi Rp.12.084.369.000,- (Pagu Akhir);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2021, Revisi RKA-KL/DIPA ke – 4 TA.2021 berupa revisi Halaman III RKA-KL/DIPA (Pagu TETAP);
5. Pada tanggal 18 November 2021, Revisi RKA-KL/DIPA ke – 5 TA.2021 berupa Revisi Satker/POK (Pagu TETAP);
6. Revisi RKA-KL/DIPA ke – 6 TA.2021 tanggal 16 Desember 2021 berupa Revisi POK Satker (Pemutakhiran/Validasi Database).

A. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2021

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang di-cascading dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)	5
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2	Nilai PNBPN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	945
3	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	60
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)	1.480
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	1
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6	Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	81
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	15
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8	Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	75
9	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)	73
		10	Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	75,07
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	85,15
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	72,50
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan	72,50

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Perikanan Nusantara Kejawan (persen)	
		14 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (nilai)	86
		15 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (nilai)	89

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan untuk Triwulan IV Tahun 2021 dapat dikomposisikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Triwulan IV Tahun 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	16.500.000	14.992.000	90,86
		BDC.001 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya	16.500.000	14.992.000	90,86
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.330.911.000	3.300.566.986	99,08
		ADC.001 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan	10.000.000	8.879.000	88,79
		BAH.001 Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan	291.417.000	283.729.105	97,36
		BGA.002 Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	289.430.000	277.259.252	95,79
		RBQ.001 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (PEN)	2.740.064.000	2.730.699.629	99,65
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	44.949.000	41.224.961	91,71
		QDC.004 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	4.000.000	2.500.000	62,50
		UBA.001 Sistem Perizinan Pusat-daerah Yang Terintegrasi	40.949.000	38.724.961	94,56
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	24.820.000	22.313.867	89,90
		QKB.001 Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	24.820.000	22.313.867	89,90
5.	2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	8.667.189.000	8.561.710.773	98,78
		EAA Layanan Perkantoran	8.305.689.000	8.215.357.744	98,91
		EAB.001 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	37.050.000	36.528.329	98,59
		EAD.002 Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	99.500.000	92.779.750	93,24
		EAF.003 Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	41.250.000	39.968.355	96,89
		EAH.003 Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.000.000	43.964.524	95,57
		EAJ.001 Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	9.900.000	9.223.849	93,17
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	127.800.000	123.888.222	96,93

B. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU ***Perspektif Internal Process dan Learning and Growth*** yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 diukur melalui 15 indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja (IK) sebagai berikut :

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN
1	Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (nelayan)	Nelayan	5	5	13	120,00
2	Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	2 Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.445	945	4.339,07	120,00
3	Tata Kelola Sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	3 Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)	Laporan	60	60	138	120,00
4	Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	4 Jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Ton)	Ton	3.930	1.480	6.224,25	120,00
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5 Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	Unit	1	1	1	100,00
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan	6 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	81	81	88,00	108,64
7	Pengelolaan awak kapal perikanan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	7 Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)	Orang	15	15	30	120,00
8	Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	8 Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	75	75	86,38	115,17

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN
9	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	9 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	Indeks	73	73	80,47	110,23
		10 Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	75,07	75,07	85,49	113,88
		11 Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	85,15	85,15	88,71	104,18
		12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	72,5	72,50	87,10	120,00
		13 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)	%	72,5	72,50	85,00	117,24
		14 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	Nilai	86	86	85,84	99,81
		14 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen)	Nilai	89	89	95,67	107,49

Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 1 – Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator ini merupakan jumlah nelayan yang telah mendapatkan fasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan non perbankan atau jumlah nelayan yang telah mendapatkan informasi mengenai pembiayaan fasilitasi kredit dari lembaga perbankan dan non perbankan melalui program pojok pendanaan nelayan yang sekaligus menjadi tempat bertemunya nelayan dengan penyuluh perikanan, petugas konsultan keuangan mitra bank (KKMB), pendamping badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (BLU LPMUKP) serta account officer lembaga keuangan dengan tujuan untuk melakukan pendampingan dalam proses

pengajuan kredit bagi nelayan. Pengukuran dan pelaporan Indikator ini pada akhir tahun. IKU jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan triwulan I 2021 ini didukung oleh anggaran kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan).

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	5	5	13	120,00	260,00

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: Persen (%)

Presentase	Realisasi Triwulan IV Tahun 2021	Realisasi Triwulan IV Tahun 2020
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	13

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terealisasi sebesar 13 orang nelayan atau sebesar 120,0% dari target yang ditetapkan di tahun 2021, Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2020, capaian pada Triwulan IV tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11 orang nelayan. Hal ini dikarenakan pendataan terhadap nelayan di PPN Kejawanan dan sekitarnya terkait penyampaian informasi serta rencana pengajuan/permohonan pendanaan usaha program pojok pendanaan nelayan mengalami peningkatan jumlah baik yang hanya memperoleh informasi terkait pojok pendanaan nelayan maupun yang sudah pada tahap pengajuan pinjaman. IKU Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Sasaran Strategis 2

Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 2 - Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator Nilai PNBP merupakan indikator pendapatan negara bukan pajak pada PPN Kejawanan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBP yang dikelola oleh PPN Kejawanan berupa PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA (tambat labuh, perijinan kapal perikanan >30GT) dan non SDA (imbal jasa UPT PPN Kejawanan).

Capaian indikator Nilai PNBP UPT PPN Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp 4,339 Milyar atau 120,00% dari target Rp 945 Juta pada Triwulan IV Tahun 2021. Penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Nilai PNBP di UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Triwulan III			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp Juta)	2.445	945	4.339,07	120,00	177,46

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Nilai PNBP UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2020

satuan: Rp. Juta

Nama IKU	Realisasi Triwulan III Tahun	Realisasi Triwulan III Tahun
	2020	2021
Nilai PNBP UPT PPN Kejawanan (Rp. Juta)	3.015	4.339,07

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2020, realisasi nilai PNBP UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 mengalami kenaikan yakni sebesar 43,91 persen.

Terhadap target Triwulan IV Tahun 2021, realisasi indikator ini telah mencapai prosentase sebesar 120,00 persen. Adanya kenaikan capaian nilai PNBP UPT PPN Kejawanan pada Triwulan IV tahun

2021 ini dikarenakan selain masa pandemi covid – 19 yang sudah mulai adanya pelanggaran oleh pemerintah juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan tarif yang mengalami kenaikan cukup signifikan, antara lain :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
II. PELABUHAN PERIKANAN		
A.		
Pelayanan Tambat dan Labuh pada Kelas Pelabuhan Perikanan Samudera, Nusantara, Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan		
1. Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan		
a. Kapal Berukuran > 100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	1.000,00
b. Kapal Berukuran > 30 - 100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
c. Kapal Berukuran > 5 - 30 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00
d. Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	5.000,00
2. Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan		
a. Kapal Berukuran > 100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	750,00
b. Kapal Berukuran > 30 - 100 GT	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	500,00
c. Kapal Berukuran > 5 - 30 GT	per kapal per etmal	4.000,00

	d. Kapal Asing	per meter panjang kapal per 1/4 etmal	3.000,00
3.	Pelayanan Tambat dan/atau Labuh Kapal Non Perikanan		
	a. Kapal Non Perikanan Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan	per meter panjang kapal per etmal	15.000,00
	b. Kapal Non Perikanan Non Penunjang Kegiatan Kapal Perikanan	per meter panjang kapal per etmal	50.000,00
4.	Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Rusak (<i>Floating Repair</i>) Menunggu Giliran Perbaikan dan Perawatan Sebelum Naik	per meter panjang kapal per etmal	3.000,00
5.	Pelayanan Tambat dan Labuh Kapal Menunggu Musim Cuaca Baik	per meter panjang kapal per etmal	1.000,00
B.	Pelayanan Pengadaan Air		
	Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI	per liter	Tarif PDAM + (20% X Tarif PDAM)
C.	Pelayanan Bengkel		
1.	Ringan		
	a. Ganti Oli	per pekerjaan	30.000,00
	b. Las	per pekerjaan per jam	35.000,00
	c. Bor	per pekerjaan per kelipatan diameter 5mm mata bor	2.000,00
	d. Gerinda/potong	per pekerjaan	4.000,00
	e. Slep	per pekerjaan	125.000,00
	f. Scrap	per pekerjaan	40.000,00
2.	Sedang		
	a. Bubut	per pekerjaan	40.000,00
	b. Press As	per pekerjaan	25.000,00
	C. Roll Pat dan Cat	per pekerjaan per jam	15.000,00
3.	Berat (<i>Overhaul</i>)	per pekerjaan	500.000,00

D.	Pelayanan Pas Masuk		
1.	Pas Harian (Sekali masuk)		
	a. Kendaraan Golongan I (R2/R3)	per unit per sekali masuk	2.000,00
	b. Kendaraan Golongan II (R4)	per unit per sekali masuk	6.000,00
	c. Kendaraan Golongan III (R6)	per unit per sekali masuk	10.000,00
	d. Kendaraan Golongan IV (R10)	per unit per sekali masuk	15.000,00
	e. Kendaraan Golongan V (> R10)	per unit per sekali masuk	20.000,00
	f. Kendaraan Golongan VI (Bus)	per unit per sekali masuk	25.000,00
2.	Pas Berlangganan		
	a. Kendaraan Golongan I (R2/R3)	Per unit per bulan	30.000,00
	b. Kendaraan Golongan II (R4)	Per unit per bulan	90.000,00
	c. Kendaraan Golongan III (R6)	Per unit per bulan	150.000,00
E.	Pelayanan Kebersihan		
1.	Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
	a. Bangunan Permanen tertutup		
	- Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	200,00
	b. Perkantoran/Pertokoan		
	- Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	200,00
	c. Rumah makan / Kios		
	- Pelabuhan Perikanan Samudera Lainnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan	per m ² per bulan	1.000,00
2.	Kebersihan Kolam Pelabuhan		

a. Kapal Perikanan Ukuran > 5GT	per GT per etmal	100,00
b. Kapal Non Perikanan Semua Ukuran	per meter panjang kapal per etmal	5.000,00
F. Pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah	per m ³	2000 + Tarif PLN
G. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan		
A. Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan		
1. Tanah di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
a. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan		
- Klaster 1	per m ² per tahun	10.000,00
b. Pemeliharaan Prasarana	per m ² per tahun	2,500,00
2. Tanah yang Dipakai di Kawasan Pelabuhan Perikanan untuk :		
a. Penjemuran Jaring / Penjemuran Ikan		
- Terbuka Beratap	per m ² per hari	1.500,00
- Terbuka Tidak Beratap	per m ² per hari	1.000,00
b. Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan		
1. Bangunan Sementara	per m ² per tahun	6.000,00
2. Bangunan Semi Permanen	per m ² per tahun	10.000,00
3. Bangunan Permanen	per m ² per tahun	15.000,00
H. Asrama		
1. Masyarakat umum (dalam rangka Kegiatan Kelautan dan Perikanan)		
a. AC	per orang per hari	80.000,00
b. Non AC	per orang per hari	40.000,00
2. Mahasiswa / Pelajar (di luar Peserta Didik di Lingkungan KKP)		
a. AC	per orang per hari	40.000,00
b. Non AC	per orang per hari	20.000,00
I. Ruang Pertemuan / Aula		
AC Kapasitas ≥ 51 s.d 100 orang	Per hari	500.000,00

J.	Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin, <i>Freezer</i> dan <i>Cold storage</i>		
	a. Pembekuan (<i>Freezer</i>)	per kg per hari	500,00 + Tarif PLN
	b. Gedung Beku (<i>Cold storage</i>)		
	1. Volume > 500 kg	per kg per hari	15,00 + Tarif PLN
	2. Volume ≤ 500 kg	per kg per hari	20,00 + Tarif PLN
	c. <i>Chest Freezer</i>	per kg per hari	1.500,00
	d. <i>Plugging Container</i>		
	1. 20' <i>Reefer Container</i>	per hari	340.000,00
	2. 40' <i>Reefer Container</i>	per hari	425.000,00
K.	Kendaraan Pengangkut		
	1. <i>Forklift</i>	per jam per unit	125.000,00
	2. <i>Crane Truck</i>	per jam per unit	150.000,00
	3. <i>Dump Truck</i>		
	- Kapasitas > 5 m ³	per jam per unit	100.000,00

Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Sumber Daya Ikan Bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 3 - Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di PPN Kejawanan

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah laporan kapal perikanan yang telah menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang ditandai dengan diterbitkannya buku kapal perikanan. Log book penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. Log book merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan nakhoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan (hasil tangkapan) di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikannya.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan tahun berjalan dengan menghitung jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikan pada SILOPI – DSS dan dilaporkan

hasil analisis data log booknya berupa data CPUE tahunan dan analisisnya pada akhir tahun.

Validasi data log book penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48 tahun 2014 tentang log book penangkapan ikan dimana data yang diserahkan adalah lengkap dan benar, yaitu adanya kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.

Penghitungan :

$$\Sigma \text{Kapal} = \text{Kapal}_1 + \text{Kapal}_2 + \dots + \text{Kapal}_n$$

Kapal1 = Kapal perikanan yang melaporkan data log book penangkapan ikan dan dimasukkan pada aplikasi SILOPI – DSS

Indikator ini ditargetkan serta dilaporkan setiap triwulan. Capaian indikator jumlah laporan data logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada triwulan IV tahun 2021 sebanyak 138 kapal atau sebesar 120,00 persen dari target triwulan IV tahun 2021. IKU Jumlah laporan data kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan triwulan IV 2021 ini didukung oleh anggaran kegiatan pengumpulan data logbook penangkapan ikan.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan s/d Triwulan IV Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan & diverifikasi di PPN Kejawanan	60	60	138	120,00	230,00

Tabel 14. Perbandingan Realisasi IKU Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV Tahun 2020

satuan: Unit

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2020	Realisasi Triwulan IV Tahun 2021
	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan & diverifikasi di PPN Kejawanan	415

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang telah dikumpulkan & diverifikasi di PPN Kejawanan sebesar 138 kapal atau 120,00% dari target Triwulan IV tahun 2021.

IKU ini merupakan cascading dari Eselon II yaitu IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

Tercapainya jumlah kapal yang menerapkan log book penangkapan ikan melalui sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terhadap Nelayan, nahkoda dan pelaku usaha di pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan membuat pencatatan dan pelaporan data Log book melalui Aplikasi E-Logbook yang user friendly, menjadikan Logbook menjadi prasyarat perpanjangan izin, pengembangan aplikasi verifikasi/validasi data logbook penangkapan ikan sebagai salah satu cara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan secara tepat dan akurat berupa Surat Klarifikasi terkait ketidakpatuhan dalam menerapkan Log book, dan kegiatan peningkatan kapasitas SDP Petugas Pencatatan di Pelabuhan Perikanan. merupakan salah satu keberhasilan pencapaian IKU jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan. Log book menjadi prasyarat perpanjangan izin, pengembangan e-log book dan verifikasi/validasi melalui aplikasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung IKU ini, antara lain:

- Pengumpulan data logbook penangkapan ikan melalui aplikasi SILOPI – DSS;
- Supervisi dan koordinasi pengumpulan data logbook penangkapan ikan;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Analisis Log Book;
- Pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Sasaran Strategis 4

Produksi Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

1. IKU 4 – Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan

Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Kejawan dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 6.224,25 Ton atau 120% dari target Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 1.480,00 Ton. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Target jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Kejawanan dapat tercapai karena faktor antara lain :

1. Kebijakan larangan bongkar muat (transshipment) diatas laut meningkatkan jumlah kapal yang tambat di darat, sehingga hasil tangkapan ikan dapat tercatat dengan baik di pelabuhan pangkalan.
2. Tindakan tegas terhadap kapal-kapal IUU fishing menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga menumbuhkan fishing ground baru atau peningkatan jumlah tangkapan di fishing ground yang lama. Persaingan dengan kapal asing juga menjadi jauh berkurang, karena selama ini nelayan lokal kalah dalam hal kapasitas kapal dan teknologi penangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh nelayan lokal.
3. Rata-rata kontribusi penangkapan di perairan umum memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penangkapan di perairan umum cukup baik dan akan semakin berkontribusi terhadap total volume jika pengelolaan perikanan di perairan umum lebih diperhatikan (termasuk kelembagaan dan sistem pencatatan data hasil tangkapan). Produksi perikanan tangkap dominan di Pelabuhan kakap merah, lemuru tenggiri.

Tabel 17. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target 2021
		Target	Realisasi	%	
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan (Ton)	3.930	1.480	6.224,25	120,00	158,37

Selanjutnya, pertumbuhan total produksi perikanan ini sesuai dengan target kebijakan produksi perikanan KKP, yakni meningkatkan produksi budidaya melalui intensifikasi/ekstensifikasi usaha serta menahan laju produksi perikanan tangkap di ambang 80% dari MSY (Maximum Sustainable Yield). Namun sesuai dengan kajian stok sumberdaya ikan yang terbaru melalui Kepmen KP No. 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP-NRI, diperoleh estimasi potensi perikanan tangkap di Indonesia adalah 9,93 juta ton. Dengan penghitungan JTB sebesar 80% dari potensi lestari, maka diperoleh angka sekitar 7,94 juta ton.

Oleh karena itu kebijakan perikanan tangkap ke depannya adalah pemanfaatan potensi SDI secara bertanggungjawab dengan pendekatan ekosistem. Salah satunya melalui peningkatan armada kapal nelayan dengan bentuk kegiatan Bantuan Sarana dan Penangkapan Ikan.

Tabel 18. Perbandingan target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan Triwulan IV tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: ton

Nama IKU	Realisasi TW IV Tahun	
	2020	2021
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPN Kejawanan (Ton)	4.421,73	6.224,25

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap Triwulan IV tahun 2020, realisasi jumlah produksi perikanan tangkap PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 40,76%. Meskipun saat ini masih dalam kondisi pelanggaran terhadap kebijakan menghadapi pandemi covid-19 akan tetapi untuk perolehan hasil tangkapan tidak berpengaruh bahkan mengalami peningkatan, salah satu faktornya dikarenakan faktor cuaca yang mendukung.

Terhadap target Triwulan IV Tahun 2021, realisasi indikator ini telah mencapai 120%. Upaya – upaya yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan melakukan kegiatan gerai perijinan di berbagai wilayah untuk lebih mempermudah para pemilik kapal untuk melakukan pengurusan perijinan dengan tetap memperhatikan syarat serta ketentuan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Kejawanan Triwulan IV tahun 2021 ini di dukung oleh anggaran kegiatan penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi dan analisis.

Sasaran Strategis 5

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 5 – Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya

IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya merupakan kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dengan memperhatikan kualitas waktu, mutu dan biaya. Pada tahun anggaran 2021 Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan anggaran untuk pengembangan fasilitas yaitu pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi serta Peningkatan Jalan Area Pengembangan Bagian Barat.

Kondisi eksisting gedung kantor yang mengalami keropos terutama di bagian rangka atap yang masih berupa kayu serta elevasi lantai yang mengalami penurunan sehingga diperlukan adanya rehab dengan tujuan untuk pengamanan aset BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Selain itu kondisi eksisting di area pengembangan bagian barat masih berupa lahan basah sehingga diperlukan adanya pematangan serta perkerasan jalan dengan menggunakan material limestone serta pelebaran jembatan.

Tahap awal untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah adanya perencanaan yang menghasilkan output berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana, Gambar Rencana, Spesifikasi Teknis serta Metode Pelaksanaan. Semua output tersebut di dokumentasikan menjadi sebuah dokumen perencanaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Perhitungan indikator ini adalah dokumen perencanaan sampai dengan dokumen dalam pelaksanaan pekerjaan serta sampai dengan saat adanya serah terima pekerjaan.

Realisasi indikator ini dilaporkan secara setiap akhir tahun. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 terealisasi capaian sebesar 1 (satu) unit atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2021..

Tabel 19. Perhitungan Akumulatif Untuk Target dan Realisasi IKU Jumlah Pengembangan Fasilitas PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya	1,00	1	1	100,00	100,00

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: Dokumen

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2020	Realisasi Triwulan IV Tahun 2021
	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya	1

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2020, realisasinya pada Triwulan IV tahun 2021 sama dikarenakan IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya merupakan IKU yang pelaporan serta formula perhitungan datanya selama 1 tahun tersebut merupakan indikator yang mempunyai data dukung berupa dokumen perencanaan serta pengembangan fasilitas PPN Kejawanan yang diperlukan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan yang didapat sesuai dengan kualitas mutu, waktu dan biaya.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang berdaya saing dan berkelanjutan

1. IKU 6 – Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Perhitungan indikator ini ditinjau dari evaluasi kinerja pelabuhan perikanan yang di nilai oleh eselon I (DJPT) meliputi operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, Coldstorage, Ice Crusher Machine, Docking/Slipway, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air ke kapal, penyaluran air bersih, penyaluran es, penyaluran BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang diinspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin, jumlah kapal yang mendaratkan ikan yang diterbitkan setiap bulan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meliputi : operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, coldstorage, ice crusher machine, docking/slipway, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air bersih, es, BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Trwiulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (%)	81	81	88	108,64	108,64

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: Persen (%)

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun	Realisasi Triwulan IV Tahun
	2020	2021
Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan	87,41	88,00

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Terhadap tahun sebelumnya yakni Triwulan IV tahun 2020, Tingkat Operasional UPT PPN Kejawanan Triwulan iv Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,67%. Terhadap target Triwulan IV Tahun 2021, realisasi indikator ini telah mencapai 108,64%. Pencapaian realisasi indikator ini berasal dari aplikasi PIPP yaitu nilai evkin yang dihitung serta diukur dari nilai rata – rata Triwulan IV (Januari – Desember) Tahun 2021. Adapun realisasi indikator ini pada Triwulan IV tahun 2021 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 46. Nilai bulanan evaluasi kinerja (evkin) untuk data dukung IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2021

**INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PP. Kejawanan**

No.	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Mencapai		Berkas
			Realisasi	Nilai	
1.	Pelaksanaan Program Kerja (PKP)	hari	8000	4,88	
2.	Kelembagaan	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3.	Aplikasi PIP online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4.	SPS	Ya/Tidak	Ya	2,00	
5.	Realisasi Persentase Anggaran	%	115,19	4,88	
6.	Pembinaan Pelabuhan	isi	120,22	4,88	
7.	Ketermampuan SAKI/tingkatnya Pelabuhan Perikanan	Belangkingan	1 tingkap	4,88	
8.	Rencana/Biaya Terasah Rukun Pelabuhan	RT	2.542,00	4,88	
9.	Panjang Dermaga	m	2.408,00	4,88	
10.	Rehabilitasi Kusen	m	300,00	4,88	
11.	Sarana Perbaikan (Dinding, Langka)	Rak/Tidak Rak	Rak	2,00	
12.	Kelengkapan Fasilitas Perikanan & Perikanan Mutu	Belangkingan	1 tingkap	2,00	
13.	Ketermampuan Lahan Pelabuhan	isi	95,00	4,88	
14.	Pelaksanaan Tambak Subuh	RT	444,00	5,00	
15.	Produksi Perikanan	Ton/tahun	28,29	3,75	
16.	Pelaksanaan Penyajian Kapal	unit	1,19	5,25	
17.	SPS/KE	isi	114,00	5,00	
18.	Keadaaan Dan Kelengkapan Teknik	Jumlah Kegiatan	4,00	4,88	
19.	Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Sumber Daya Manu, Peralatan/Alat Baku, Fasilitas	Jumlah Kegiatan	4,00	4,88	
20.	Pelaksanaan ES	unit	9,94	4,88	
21.	Pelaksanaan Air Bersih (sangat baik/teknis/propaganda)	%	95,00	3,00	
22.	Pelaksanaan ES (sangat)	%	95,11	3,00	
23.	Pelaksanaan MBM (sangat)	%	89,88	3,75	
24.	Pelaksanaan Pengaliran Kapal Pelabuhan di perairan	unit	60,00	4,88	
25.	Pembinaan Lahan Pelabuhan	isi	8.982,01	4,88	
26.	Pengawasan Tenaga Kerja	Keang/Man	2.787,63	5,00	
27.	Pelaksanaan Jumlah Sewa/ Sewa (2014) (jumlah Perikanan)	Pelaksanaan/Man	9.841	5,00	
Jumlah				93,75	
(tercapaian dari maksimum)				SANGAT BAIK	

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERIKANAN
PP. Semarang

No.	Jenis Kinerja	Unit Ukuran	Februari		Nilai	Persentase
			Realisasi	Target		
1	Indeks/ Pengisian Data (IPD)	Nilai	21,00	21,00	100	100%
2	3-Logbook	%/Tahun	75	75	100	100%
3	Apikasi SP2-Online	%/Tahun	75	75	100	100%
4	SP2	%/Tahun	75	75	100	100%
5	Realisasi Pengawasan Anggasa	%	71,17	71,17	100	100%
6	Penyediaan Perahu	%	100,00	100,00	100	100%
7	Ketersediaan SP2 Pengada Perahu Perikanan	Kelengkapan	lengkap	lengkap	100	100%
8	Kapasitas Daya Tempung/Kapas Perahu	GT	1.000,00	1.000,00	100	100%
9	Pengap/Strategi	isi	1.000,00	1.000,00	100	100%
10	Kondisi dan Kelembagaan	isi	100,00	100,00	100	100%
11	Sistem Perikanan (Dredging, Jangkar)	Ada/Tidak Ada	ada	ada	100	100%
12	Kelengkapan Fasilitas Pemantauan & Observasi Ikan	Kelengkapan	lengkap	lengkap	100	100%
13	Ketersediaan Labor Perikanan	isi	10,00	10,00	100	100%
14	Pelatihan Tambak Lebar	GT	100,00	100,00	100	100%
15	Produk Perikanan	Ton/Kar	30,30	30,30	100	100%
16	Indeks/ Pengisian Kapsul	isi	1,00	1,00	100	100%
17	SP2/SP3	%	100,00	100,00	100	100%
18	Sensitivitas Dan Kemampuan Tolak	Jumlah Kegiatan	6,00	6,00	100	100%
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perikanan/Perikanan (dan .../Publikasi)	Jumlah Kegiatan	6,00	6,00	100	100%
20	Pelaksanaan RI	isi	100	100	100	100%
21	Pengalasan RI Berada (Bapak dan Induk/ pengalasan)	%	10,00	10,00	100	100%
22	Pengalasan RI (Kapsul)	%	10,00	10,00	100	100%
23	Pengalasan RI (Bapak)	%	10,00	10,00	100	100%
24	Pelaksanaan Pengalasan Kapsul Perikanan di WNDP	isi	10,00	10,00	100	100%
25	Pemantauan Labor Perikanan	%	100,00	100,00	100	100%
26	Pengawasan Tenaga Kerja	Struktur/isi	1.000,00	1.000,00	100	100%
27	Realisasi Jumlah Investasi di Perikanan Perikanan	Perencanaan/isi	0,00	0,00	100	100%
Jumlah					100,00	100,00
Sensitivitas dan Kemampuan Tolak					100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERIKANAN
PP. Kojawanan

No.	Jenis Kinerja	Unit Ukuran	Maret		Nilai	Persentase
			Realisasi	Target		
1	Indeks/ Pengisian Data (IPD)	Nilai	10,00	10,00	100	100%
2	3-Logbook	%/Tahun	75	75	100	100%
3	Realisasi SP2-Online	%/Tahun	75	75	100	100%
4	SP2	%/Tahun	75	75	100	100%
5	Realisasi Pengawasan Anggasa	%	110,71	110,71	100	100%
6	Penyediaan Perahu	%	100,00	100,00	100	100%
7	Ketersediaan SP2 Pengada Perahu Perikanan	Kelengkapan	lengkap	lengkap	100	100%
8	Kapasitas Daya Tempung/Kapas Perahu	GT	100,00	100,00	100	100%
9	Pengap/Strategi	isi	1.000,00	1.000,00	100	100%
10	Kondisi dan Kelembagaan	isi	100,00	100,00	100	100%
11	Sistem Perikanan (Dredging, Jangkar)	Ada/Tidak Ada	ada	ada	100	100%
12	Kelengkapan Fasilitas Pemantauan & Observasi Ikan	Kelengkapan	lengkap	lengkap	100	100%
13	Ketersediaan Labor Perikanan	isi	10,00	10,00	100	100%
14	Pelatihan Tambak Lebar	GT	100,00	100,00	100	100%
15	Produk Perikanan	Ton/Kar	4,41	4,41	100	100%
16	Indeks/ Pengisian Kapsul	isi	1,00	1,00	100	100%
17	SP2/SP3	%	100,00	100,00	100	100%
18	Sensitivitas Dan Kemampuan Tolak	Jumlah Kegiatan	6,00	6,00	100	100%
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perikanan/Perikanan (dan .../Publikasi)	Jumlah Kegiatan	6,00	6,00	100	100%
20	Pelaksanaan RI	isi	100	100	100	100%
21	Pengalasan RI Berada (Bapak dan Induk/ pengalasan)	%	10,00	10,00	100	100%
22	Pengalasan RI (Kapsul)	%	10,00	10,00	100	100%
23	Pengalasan RI (Bapak)	%	10,00	10,00	100	100%
24	Pelaksanaan Pengalasan Kapsul Perikanan di WNDP	isi	10,00	10,00	100	100%
25	Pemantauan Labor Perikanan	%	100,00	100,00	100	100%
26	Pengawasan Tenaga Kerja	Struktur/isi	1.000,00	1.000,00	100	100%
27	Realisasi Jumlah Investasi di Perikanan Perikanan	Perencanaan/isi	0,00	0,00	100	100%
Jumlah					100,00	100,00
Sensitivitas dan Kemampuan Tolak					100,00	100,00

**INDIKTOR KINERJA PELAKSANAAN PERUBAHAN
PP. Kejawaanan**

No.	Indikator Kinerja	Unit Layanan	April		Berkas	Berkas/Target
			Realisasi	Nilai		
1	Evaluasi Implementasi Data (DPP)	Bak	28,00	4,00		
2	E-Logbook	Tu/Tidak	Ya	3,00		
3	Aplikasi SPK online	Tu/Tidak	Ya	3,00		
4	SPK	Tu/Tidak	Ya	3,00		
5	Kelembagaan Pemasangan Anggaran	%	234,21	4,00		
6	Perencanaan Pelaksanaan	%	188,28	4,00		
7	Kelembagaan SKM Pengalihan Pelaksanaan Perbaikan	Kelengkapan	lengkap	4,00		
8	Keperluan Biaya Yangang Tidak Pelaksanaan	BT	1.000,00	3,00		
9	Pemang Berorganisasi	in	1.000,00	4,00		
10	Kelembagaan Sistem	in	388,28	4,00		
11	Kelembagaan Pelaksanaan (Berkas, lengkap)	Jadi/Tidak Jadi	Ada	3,00		
12	Kelengkapan Fasilitas Kelembagaan & Kelembagaan	Kelengkapan	lengkap	3,00		
13	Kelembagaan Pelaksanaan	in	28,00	4,00		
14	Pelaksanaan Laporan Labrak	BT	162,28	3,00		
15	Prosedur Pelaksanaan	Tu/Tidak	22,07	3,75		
16	Pelaksanaan Keperluan Biaya	lengkap	1,28	4,25		
17	SPK	%	188,28	3,75		
18	Kelembagaan dan Kelembagaan Sistem	Kelembagaan	4,00	4,00		
19	Kelembagaan Pelaksanaan, Pengalihan dan Pengalihan Sistem Daya Baru, Pelaksanaan dan Baru, Pelaksanaan	Kelembagaan	4,00	4,00		
20	Pelaksanaan SPK	lengkap	4,00	4,00		
21	Pelaksanaan Air Bersih (Bapak dan Ibu) (Kelembagaan)	%	81,57	4,00		
22	Pelaksanaan (in) (Bapak)	%	87,54	3,00		
23	Pelaksanaan SKM (Bapak)	%	37,74	3,75		
24	Pelaksanaan Pelaksanaan (Bapak) Pelaksanaan di WISPP	lengkap	28,00	4,00		
25	Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan	%	4.901,41	3,00		
26	Pelaksanaan Tenaga Kerja	Kelembagaan	1.001,47	3,00		
27	Pelaksanaan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan	Pelaksanaan/Kelembagaan	1.001	3,00		
Jumlah					100,00	
Kelembagaan dan Pelaksanaan						SANGAT BAIK

**INDIKTOR KINERJA PELAKSANAAN PERUBAHAN
PP. Kejawaanan**

No.	Indikator Kinerja	Unit Layanan	Maj		Berkas	Berkas/Target
			Realisasi	Nilai		
1	Evaluasi Implementasi Data (DPP)	Bak	22,00	4,00		
2	E-Logbook	Tu/Tidak	Ya	3,00		
3	Aplikasi SPK online	Tu/Tidak	Ya	3,00		
4	SPK	Tu/Tidak	Ya	3,30		
5	Kelembagaan Pemasangan Anggaran	%	234,21	4,00		
6	Perencanaan Pelaksanaan	%	187,21	4,00		
7	Kelembagaan SKM Pengalihan Pelaksanaan Perbaikan	Kelengkapan	lengkap	4,00		
8	Keperluan Biaya Yangang Tidak Pelaksanaan	BT	1.000,00	4,00		
9	Pemang Berorganisasi	in	1.000,00	4,00		
10	Kelembagaan Sistem	in	388,28	4,00		
11	Kelembagaan Pelaksanaan (Berkas, lengkap)	Jadi/Tidak Jadi	Ada	3,00		
12	Kelengkapan Fasilitas Kelembagaan & Kelembagaan	Kelengkapan	lengkap	3,00		
13	Kelembagaan Laporan Pelaksanaan	in	28,00	4,00		
14	Pelaksanaan Laporan Labrak	BT	162,28	3,00		
15	Prosedur Pelaksanaan	Tu/Tidak	22,34	3,75		
16	Pelaksanaan Keperluan Biaya	lengkap	1,28	4,25		
17	SPK	%	187,21	3,75		
18	Kelembagaan dan Kelembagaan Sistem	Kelembagaan	4,00	4,00		
19	Kelembagaan Pelaksanaan, Pengalihan dan Pengalihan Sistem Daya Baru, Pelaksanaan dan Baru, Pelaksanaan	Kelembagaan	4,00	4,00		
20	Pelaksanaan SPK	lengkap	4,00	4,00		
21	Pelaksanaan Air Bersih (Bapak dan Ibu) (Kelembagaan)	%	81,57	4,00		
22	Pelaksanaan (in) (Bapak)	%	100,00	3,00		
23	Pelaksanaan SKM (Bapak)	%	88,07	3,75		
24	Pelaksanaan Pelaksanaan (Bapak) Pelaksanaan di WISPP	lengkap	28,00	4,00		
25	Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan	%	4.901,41	3,00		
26	Pelaksanaan Tenaga Kerja	Kelembagaan	1.001,47	3,00		
27	Pelaksanaan Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan	Pelaksanaan/Kelembagaan	1.001	3,00		
Jumlah					100,00	
Kelembagaan dan Pelaksanaan						SANGAT BAIK

**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN PERIKANAN
PP. KAJAWANAN**

No.	Analisis Kinerja	Unit Ukuran	Juni		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Indeks Pengiriman Data (IPD)	Sal	10,00	5,00	
2	I-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi MP-e-codes	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SPH	Ya/Tidak	Tidak	0,25	
5	Realisasi Penerimaan Anggapan	Rs	313,24	4,00	
6	Perencanaan Pelaksanaan	Rs	10,00	4,00	
7	Kelembagaan SDM Pengelola Pelaksanaan Perikanan	Kelengkapan	Langkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tanggung Kelautan Pelaksanaan	GT	2.011,00	4,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.520,00	4,00	
10	Kondisi dan Sistem	m	000,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, jangkar)	Ada/Tidak ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemukiman & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Langkap	2,00	
13	Keteredilasan Lahan Pelaksanaan	Rs	10,00	4,00	
14	Pelaksanaan Tambak Lahan	GT	415,00	5,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	10,00	0,00	
16	Produksi Kujangan Kapal	Unit	2,00	1,25	
17	STB&K	Rs	100,00	5,00	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
19	Yakutik Perikanan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Penguatan SDM, Penguatan Ikan, Penguatan	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
20	Pelaksanaan ES	Sal	Sal	4,00	
21	Pemuliharaan Air Bersih (Jual) dan Industri pengolahan	Rs	00,00	3,00	
22	Pemuliharaan Es (Jual)	Rs	100,00	3,00	
23	Pemuliharaan BSM (Jual)	Rs	00,00	0,75	
24	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Perikanan di WOPF	Unit	10,00	4,00	
25	Pemuliharaan Lahan Pelaksanaan	Rs	0,00	3,00	
26	Pemuliharaan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.000,00	3,00	
27	Perubahan jumlah investor di Perikanan Perikanan	Perusahaan/Bulan	1 (0)	1,00	
Jumlah				91,5	
Kategori dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

**INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN PERIKANAN
PP. KAJAWANAN**

No.	Analisis Kinerja	Unit Ukuran	Juli		Keterangan
			Realisasi	Nilai	
1	Indeks Pengiriman Data (IPD)	Sal	10,00	5,00	
2	I-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi MP-e-codes	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SPH	Ya/Tidak	Ya	2,00	
5	Realisasi Penerimaan Anggapan	Rs	77,52	4,00	
6	Perencanaan Pelaksanaan	Rs	125,04	4,00	
7	Kelembagaan SDM Pengelola Pelaksanaan Perikanan	Kelengkapan	Langkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tanggung Kelautan Pelaksanaan	GT	1.560,00	4,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.020,00	4,00	
10	Kondisi dan Sistem	m	100,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, jangkar)	Ada/Tidak ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemukiman & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Langkap	2,00	
13	Keteredilasan Lahan Pelaksanaan	Rs	10,00	4,00	
14	Pelaksanaan Tambak Lahan	GT	195,00	5,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	10,00	0,75	
16	Produksi Kujangan Kapal	Unit	1,00	1,25	
17	STB&K	Rs	100,00	5,00	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
19	Yakutik Perikanan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Penguatan SDM, Penguatan Ikan, Penguatan	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
20	Pelaksanaan ES	Sal	Sal	4,00	
21	Pemuliharaan Air Bersih (Jual) dan Industri pengolahan	Rs	00,00	3,00	
22	Pemuliharaan Es (Jual)	Rs	00,00	3,00	
23	Pemuliharaan BSM (Jual)	Rs	00,00	0,75	
24	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Perikanan di WOPF	Unit	10,00	4,00	
25	Pemuliharaan Lahan Pelaksanaan	Rs	0,00	3,00	
26	Pemuliharaan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.770,00	3,00	
27	Perubahan jumlah investor di Perikanan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (0)	1,00	
Jumlah				91,75	
Kategori dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERIKANAN
PP, KAJAWANAN**

No.	Jenis Kinerja	Unit Satuan	Agust		Keterangan
			Realisasi	Misi	
1	Frekuensi Pengiriman Data (RPP)	Kali	17,00	4,00	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi SPN-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SHT	Ya/Tidak	Ya	2,00	
5	Realisasi Penyusunan Anggaran	%	75,70	3,00	
6	Ketersediaan Pelabuhan	%	288,18	4,00	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	lengkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tampung Tokan Pelabuhan	GT	618,00	6,00	
9	Perajang Dermaga	m	1.018,00	4,00	
10	Kedalaman Kalan	cm	800,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, jangki)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemantauan & Distribusi Ikan	Kelengkapan	lengkap	2,00	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	Ya	15,00	4,00	
14	Pelayanan Tambak Leleuk	GT	100,00	6,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	6,31	2,00	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	3,20	6,00	
17	STBLUK	%	311,76	5,00	
18	Sosialisai Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	2,00	2,00	
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pemantauan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4,00	6,00	
20	Pelaksanaan RI	Real	Real	4,00	
21	Penyulhan AP Bersih (kapal dan industri pengalihan)	%	80,18	3,00	
22	Penyulhan IS (kapal)	%	80,18	3,00	
23	Penyulhan BSM (kapal)	%	80,18	3,75	
24	Pelayanan Pengalihan Hasil Perikanan di WKPDP	Unit	15,00	4,00	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.963,63	3,00	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.807,00	3,00	
27	Perubahan jumlah investor di Pelabuhan Perikanan	Pertambahan/Bulan	0 (0)	3,00	
Jumlah				80,00	
Ketercapaian dan Ketertarikan				100%	

**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERIKANAN
PP, KAJAWANAN**

No.	Jenis Kinerja	Unit Satuan	September		Keterangan
			Realisasi	Misi	
1	Frekuensi Pengiriman Data (RPP)	Kali	20,00	4,00	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi SPN-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SHT	Ya/Tidak	Tidak	0,50	
5	Realisasi Penyusunan Anggaran	%	75,70	3,00	
6	Ketersediaan Pelabuhan	%	104,18	4,00	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	lengkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tampung Kalan Pelabuhan	GT	2.018,00	6,00	
9	Perajang Dermaga	m	2.018,00	4,00	
10	Kedalaman Kalan	cm	300,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, jangki)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemantauan & Distribusi Ikan	Kelengkapan	lengkap	2,00	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	Ya	29,00	4,00	
14	Pelayanan Tambak Leleuk	GT	228,00	6,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	25,50	3,75	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	3,10	3,25	
17	STBLUK	%	173,43	5,00	
18	Sosialisai Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
19	Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pemantauan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
20	Pelaksanaan RI	Real	Real	4,00	
21	Penyulhan AP Bersih (kapal dan industri pengalihan)	%	82,18	3,00	
22	Penyulhan IS (kapal)	%	82,18	3,00	
23	Penyulhan BSM (kapal)	%	81,92	3,75	
24	Pelayanan Pengalihan Hasil Perikanan di WKPDP	Unit	15,00	4,00	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.963,63	3,00	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.042,00	3,00	
27	Perubahan jumlah investor di Pelabuhan Perikanan	Pertambahan/Bulan	0 (0)	3,00	
Jumlah				80,00	
Ketercapaian dan Ketertarikan				100% Real	

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PP. Kejawanan

			October		
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	21,00	5,00	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	89,53	4,00	
6	Pendapatan Pelabuhan	%	138,06	4,00	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	2.146,00	3,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	338,00	5,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	17,87	3,75	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1,55	1,25	
17	STBLKK	%	162,50	5,00	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	4,00	4,00	
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	6,00	4,00	
20	Pelaksanaan KS	Hasil	Baik	4,00	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	97,55	3,00	
22	Penyaluran Es (kapal)	%	94,21	3,00	
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	91,56	3,75	
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.953,70	3,00	
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (45)	1,00	
Jumlah				89,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PP. Kejawanan

			November		
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	24,00	5,00	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SHTI	Ya/Tidak	Tidak	0,50	
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	92,07	4,00	
6	Pendapatan Pelabuhan	%	113,28	4,00	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	1.233,00	2,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	158,00	5,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	12,16	3,75	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	1,10	1,25	
17	STBLKK	%	175,76	5,00	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5,00	4,00	
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	6,00	4,00	
20	Pelaksanaan KS	Hasil	Baik	4,00	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	92,43	3,00	
22	Penyaluran Es (kapal)	%	88,86	3,00	
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	91,88	3,75	
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.861,78	3,00	
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (45)	1,00	
Jumlah				87,25	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

INDIKATOR KINERJA PELABUHAN PERIKANAN
PP. Kejawan

			December		
No.	Jenis Kriteria	Unit Satuan	Realisasi	Nilai	Keterangan
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	24,00	5,00	
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	%	98,84	4,00	
6	Pendapatan Pelabuhan	%	146,08	4,00	
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	2.352,00	4,00	
9	Panjang Dermaga	m	2.018,00	4,00	
10	Kedalaman Kolam	cm	300,00	4,00	
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	ha	19,02	4,00	
14	Pelayanan Tambat Labuh	GT	266,00	5,00	
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	22,39	3,75	
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	2,10	1,25	
17	STBLKK	%	203,08	5,00	
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	5,00	4,00	
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	6,00	4,00	
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	78,07	3,00	
22	Penyaluran Es (kapal)	%	78,38	3,00	
23	Penyaluran BBM (kapal)	%	75,21	3,75	
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	Unit	16,00	4,00	
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	%	8.961,61	3,00	
26	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	2.937,90	3,00	
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	0 (45)	1,00	
Jumlah				90,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi				SANGAT BAIK	

No	Bulan	Nilai Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan (EVKIN)	Nilai Rata - Rata
1	Januari	89,75	
2	Februari	88,75	
3	Maret	86,25	
TRIWULAN I			88,25
4	April	88,5	
5	Mei	88,25	
6	Juni	90,5	
TRIWULAN II			88,66
7	Juli	89,75	
8	Agustus	80,25	
9	September	86,25	
TRIWULAN III			87,58
10	Oktober	89,75	
11	November	87,25	
12	Desember	90,75	
TRIWULAN IV			88,00

Sasaran Strategis 7

Pengelolaan awak kapal perikanan yang bedaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 7 - Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah nelayan/awak kapal yang telah memperoleh pelatihan, bimtek atau sertifikasi mengenai awak kapal perikanan antara lain Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI) yang diharapkan awak kapal perikanan/nelayan dapat mengoperasikan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan baik dan efektif sesuai kaidah FAO dan sertifikasi ketrampilan penanganan ikan (SKPI) yang bertujuan agar awak kapal perikanan/nelayan dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai kaidah keamanan pangan. Pengukuran dan pelaporan Indikator ini setiap triwulan. IKU Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan ketrampilan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2021 ini didukung oleh anggaran kegiatan bimbingan teknis SKPI bagi awak kapal perikanan.

Tabel 33. Target dan Realisasi IKU Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi s/d Triwulan IV Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi	15	15	30	120,00	200,00

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: orang

Nama IKU	Realisasi Triwulan IV Tahun 2020	Realisasi Triwulan IV Tahun 2021
	2020	2021
Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	-	30

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Realisasi Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sudah tercapai pada Triwulan IV tahun 2021 sebesar 30 orang atau 120,00% dari target tahun 2021. IKU Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan sudah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SKPI (Sertifikasi Ketrampilan Penanganan Ikan) pada bulan Januari Tahun 2021.

Sasaran Strategis 8

Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

1. IKU 8 – Presentase Kapal Perikanan yang Berizin Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator ini merupakan perhitungan terhadap perbandingan yang dilakukan antara kapal perikanan yang berdomisili di PPN Kejawanan dengan jumlah kapal yang mempunyai izin baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, antara lain uji coba pelayanan perizinan (SIUP, SIPI/SIKPI) menggunakan sistem aplikasi daerah atau disingkat SIMKADA dan terintegrasi dengan perizinan pusat. Penguatan dan integrasi SIMKADA ini melalui 4 (empat) tahapan yakni (1) Survei pemberian izin daerah, (2) Uji coba aplikasi dan pelatihan operator, (3) Pengisian basis data dan (4) Implementasi. Pengukuran dan pelaporan Indikator ini pada akhir tahun. IKU presentase penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV 2021 ini didukung oleh anggaran kegiatan koordinasi dalam rangka pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.

Tabel 35. Target dan Realisasi IKU Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Trwiulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan (%)	75	75	86,38	115,17	115,17

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 terhadap Realisasi Triwulan IV tahun 2020

satuan: Persen (%)

Presentase	Realisasi Triwulan IV Tahun	Realisasi Triwulan IV Tahun
	2020	2021
Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan	100,00	86,38

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan memperoleh capaian sebesar 86,38 atau sebesar 115,17% dari target Triwulan IV tahun 2021, IKU ini baru dapat dicapai pada akhir tahun karena formula perhitungan data capaian IKU selama 1 tahun. Selain itu IKU Presentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPN Kejawanan merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

Sasaran Strategis 9

Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (2) Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (4) Tingkat Kepatuhan Pengadaan barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (5) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (6) Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan; (7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

1. IKU 9 – Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan

mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Seksi/Subbag di PPN Kejawanan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Tabel 38 .Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Indeks)	73	73	80,47	110,23	110,23

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup PPN Kejawanan memperoleh capaian sebesar 80,47 yang termasuk kategori SEDANG,

Hal yang dilakukan oleh PPN Kejawanan untuk meningkatkan nilai IP ASN serta meningkatkan kompetensi pegawai yaitu dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan, bimbingan teknis baik yang dilakukan secara offline (luring) maupun online (daring). Salah satu contohnya yaitu seperti yang dilaksanakan di PPN Kejawanan kegiatan Pelatihan Customer Relationship Management/Manajemen Pengelolaan Kepuasan Pelanggan oleh Fasilitator Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 – 24 September 2021 yang diikuti oleh seluruh pegawai.

Pada level II IKU ini di cascading ke Level III (semua seksi dan sub bagian) dengan perhitungan secara tahunan dengan indikator sebagai berikut :

Dalam penilaian kompetensi pejabat struktural lingkup UPT PPN Kejawanan, terdapat 12 komponen standar kompetensi yakni sebagai berikut :

- (1) Integritas dengan kriteria : (a) Konsisten dan berpegang pada etika dan tata nilai organisasi yang berlaku, (b) Secara terbuka menyatakan pandangan tentang ketidak etisan meskipun hal itu akan merusak hubungan kerjanya, (c) Mengajak orang lain untuk membangun kepercayaan dan berkerja sesuai dengan etika organisasi yang berlaku, (d) Membangun pola cata kerja atau iklim kerja yang kondusif dengan memberikan suasana yang dapat menumbuhkembangkan saling percaya dan (e) Menjadi contoh bagi orang lain dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja.
- (2) Kepemimpinan dengan kriteria : (a) Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja, (b) Melakukan bimbingan kepada tim kerja, (c) Pendelegasian tugas dan wewenang, (d) Pengorganisasian sumber daya yang ada dan (e) Membangun situasi yang kondusif.
- (3) Perencanaan pengorganisasian dengan kriteria : (a) Mengetahui jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan organisasi, (b) Menentukan skala prioritas kegiatan kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, (c) Memprediksi permasalahan dan menyusun tahapan penyelesaian masalah yang timbul, (d) Menggunakan penyelesaian secara sistimatis dalam menghadapi

- masalah dan membuat alternatif-alternatif untuk meningkatkan kinerja dan (e) Merumuskan tindakan jangka panjang sesuai dengan tujuan organisasi.
- (4) Kerjasama, dengan kriteria : (a) Bersikap pasif dalam kelompok. Mendukung tujuan dan keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan tugas secara bersama. Berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.
 - (5) Fleksibilitas berpikir, dengan kriteria : (a) Tidak mampu menerima pandangan dari orang lain. Mengikuti alur pemikiran pandangan dari orang lain Berupaya mendapatkan pandangan dari berbagai pihak dalam menghadapi perubahan situasi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.
 - (6) Berorientasi pada kualitas, dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, (b) Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas didukung dengan bahan yang benar, Mengamati prosedur kerja dengan cermat untuk mengantisipasi masalah yang timbul dan menetapkan standar kerja, (c) Membuat standar kerja baru untuk memperbaiki proses kerja agar efektif dan efisien. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk menghindari kesalahan dengan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif.
 - (7) Berorientasi pada pelayanan, dengan kriteria : (a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan pelayanan secara tepat dan tepat sesuai kebutuhan pelanggan, (b) Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, (c) Mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memprediksi perubahan kebutuhan pelanggan. Mengembangkan metode baru dalam meningkatkan pelayanan.
 - (8) Manajemen Waktu dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan waktu yang disediakan, (b) Menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, (d) Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang diperlukan dan (e) Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan dengan target waktu yang ada.
 - (9) Pengambilan keputusan dengan kriteria : (a) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, (b) Mengumpulkan informasi dan dukungan dari lingkungan dalam pengambilan keputusan, (c) Membuat keputusan penyelesaian masalah dengan telah mempertimbangkan konsekuensinya, (d) Menetapkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan (e) Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasil-hasil dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
 - (10) Pengaturan kerja dengan kriteria : (a) Mengenali tugas/pekerjaan yang lebih penting dan kurang penting, (b) Memastikan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan telah tersedia sesuai kebutuhan, (c) Menyusun alokasi dan penggunaan waktu yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan, (d) Mengkoordinasi antara perencanaan kerja orang lain dan diri sendiri untuk menghindari masalah dan (e) Memanfaatkan berbagai sumber yang ada yang ada secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.
 - (11) Kepemimpinan strategis
 - (12) Membangun hubungan kerja strategis.

Selain penilaian kompetensi juga ada penilaian terhadap tingkat kualifikasi pendidikan, kinerja serta disiplin yang artinya melihat pegawai apakah sudah pernah atau tidak pernah mendapat hukuman terkait kedisiplinan. Dari keempat komponen penilaian dihitung dengan membuat rata – rata yang menghasilkan indeks profesionalitas dari ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

2. IKU 10 – Nilai Capaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “*Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kejawanan*” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Internal PPN Kejawanan yang ditunjuk oleh Kepala PPN Kejawanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akan dinilai;
- b) Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c) Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d) Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e) Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f) Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain :
 - a. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian : Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
 - b. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan

pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,

- d. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
- a. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,
 - b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Pengukuran dan pelaporan realisasi indikator ini dilakukan pada akhir tahun berjalan penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dalam hal ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, penancangan dilakukan pada bulan April tahun 2019 dan sudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) periode Oktober tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021.

Tabel 37. Target dan Realisasi IKU Nilai Capaian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	75,07	75,07	85,49	113,88	113,88

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memperoleh capaian sebesar 85,49. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Selain itu IKU Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3. IKU 11– Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan dengan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang berasal dari Inspektorat Bidang II yang nantinya hasil atas penilaian mandiri tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap serta Inpektorat Jenderal Bidang II Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Target indikator ini akhir tahun adalah nilai 85,15 Indikator ini dinilai pada akhir tahun sehingga pada Triwulan IV Tahun 2021 terdapat realisasi/capaian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 44 .Target dan Realisasi IKU Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Triwulan III			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (%)	85,15	85,15	88,71	104,18	104,18

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memperoleh realisasi capaiannya sebesar 88,71 yang diperoleh pada saat dilakukan Penilaian Mandiri bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis, Rekonsiliasi Kinerja serta Penilaian Mandiri SAKIP Satker UPT yang dilaksanakan pada tanggal 01 – 04 November 2021 di Hotel Grand Mercure Bandung. Selain itu IKU Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

4. IKU 12 – Nilai Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN, dan kegiatan prioritas/strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Target indikator ini akhir tahun adalah nilai 72,50. Indikator ini dinilai pada akhir tahun sehingga s/d

Triwulan IV Tahun 2021 terdapat realisasi/capaian sebesar 85,00 atau sebesar 117,24% dari target yang ditetapkan serta diperoleh melalui Lembar Kerja Penilaian Mandiri dari Inspektorat Jenderal KKP seperti tabel dibawah ini :

Tabel 44 .Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Triwulan IV			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	72,50	72,50	85	117,24	117,24

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal II pada Triwulan IV tahun 2021. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- (1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- (2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- (3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- (4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memperoleh realisasi capaiannya sebesar 85 atau sebesar 117,24% dari target Triwulan IV tahun 2021. Selain itu IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU baru di tahun 2021 serta merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

5. IKU 13 – Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN, dan kegiatan prioritas/strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Target indikator ini akhir tahun adalah nilai 72,50. Indikator ini dinilai pada akhir tahun sehingga s/d Triwulan IV Tahun 2021 terdapat realisasi/capaian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 45 .Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Triwulan III			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)	72,50	72,50	87,10	120,00	120,14

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal II pada Triwulan IV tahun 2021 melalui Lembar Kerja Penilaian Mandiri Satker UPT PPN Kejawanan. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- (1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- (2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- (3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- (4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- (5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan terdapat realisasi capaiannya sebesar 87,10 atau sebesar 120,00% dari target Triwulan IV tahun 2021. Selain itu IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU baru di tahun 2021 serta merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

6. IKU 14 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi memperhitungkan capaian atas 1) pengelolaan anggaran atau yang biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dan 2) indikator kinerja anggaran atau biasa disebut Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut NKA dan IKPA menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan Satu DIPA pada Kantor

Pusat (KP), maka terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2021 antara lain:

No	IKU	Periode Pengukuran		Target						Justifikasi Perubahan
		Semula	Menjadi	Semula				Menjadi		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Semester I	Semester II	
1	Indikator Kinerja Anggaran (NKA)	Triwulan	Semester	5	25	35	86	-	86	<p>✓ Aplikasi SMART DJA masih dalam Tahap pengembangan, kondisi saat ini penginputan di level satker dan masih terdapat kendala gagal login, tidak ada nilai NKA, tidak ada dashboard yang menampilkan capaian-capaian satker, sehingga masih membutuhkan perbaikan;</p> <p>✓ Berdasarkan informasi Direktorat Sistem Penganggaran Kemenkeu, untuk pengembangan berikutnya level Unit Eselon I dan level KL masih dalam proses dan belum dapat dipastikan level Unit Eselon I dan KL akan siap digunakan.</p>

- b) Pada unit kerja LPMUKP penilaian kinerja hanya menilai kinerja anggaran (NKA) pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan;
- c) Data realisasi nilai IKPA dan NKA akan diunduh per semester oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal melalui aplikasi OM SPAN setiap tanggal 14 bulan berikutnya, untuk nilai IKPA dan NKA bulan Juni 2021 (semester I), dan Desember 2021 (semester II). Data IKPA dan NKA ini, nantinya dapat digunakan sebagai nilai realisasi IKPA dan NKA pada aplikasi Kinerja di unit kerja masing-masing;
- d) Setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, baik di level satker dan level Unit Eselon I, terhadap capaian nilai IKPA dan NKA masing-masing;
- e) Melakukan entry data pada aplikasi SMART DJA secara berjenjang yaitu level satker, level Unit Eselon I setiap bulannya dengan tepat waktu;

- f) Mempedomani beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan capaian IKPA dan NKA pada satker masing-masing antara lain:
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - ✓ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
 - ✓ Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/PB.2/2021 tentang Pelaksanaan Pelaporan Data Capaian Output DIPA Tahun 2021 pada Aplikasi SAS;
- Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN, dan kegiatan prioritas/strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Target indikator ini akhir tahun adalah nilai 72,50. Indikator ini dinilai pada akhir tahun sehingga s/d Triwulan IV Tahun 2021 terdapat realisasi/capaian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 45 .Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Nama IKU	Target 2021	Triwulan III			% Terhadap Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Anggaran PPN Kejawanan (nilai)	86	86	85,84	99,81	99,81

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal II pada Semester I dan Semester II tahun 2021.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat digambarkan beberapa hal sebagai berikut:

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan memperoleh realisasi capaiannya sebesar 85,84 atau sebesar 99,81% dari target Triwulan IV tahun 2021. Selain itu IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan merupakan IKU baru di tahun 2021 serta merupakan IKU cascading dari Eselon II yaitu IKU Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap.

1. IKU 15 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan (Nilai)

Dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA), selain itu berdampak pada aplikasi OM SPAN (penilaian IKPA) dan SMART DJA (Penilaian NKA) dalam pengukuran kinerja anggaran.

Sehubungan hal tersebut IKPA dan NKA yang menjadi IKU lingkup KKP Tahun 2021 membutuhkan penyesuaian dengan kebijakan dan implementasi aplikasi pengukuran kinerja anggaran, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan terbaru yang dapat dipedomani dalam penilaian kinerja anggaran dan penyampaian perubahan periode pengukuran dan target IKU IKPA dan NKA sebagai berikut:

- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- ✓ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
- ✓ Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/PB.2/2021 tentang Pelaksanaan Pelaporan Data Capaian Output DIPA Tahun 2021 pada Aplikasi SAS;

No	IKU	Periode Pengukuran		Target						Justifikasi Perubahan
		Semula	Menjadi	Semula				Menjadi		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Semester I	Semester II	
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			85	86	87	89	80	89	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Data IKPA yang tersedia pada aplikasi OM SPAN masih dalam validasi Biro Keuangan, hal ini berkaitan dengan jumlah satker yang ada pada IKPA sebanyak 438 satker, berdasarkan DIPA jumlah satker lingkup KKP Tahun 2021 sebanyak 398 dan terdapat beberapa satker yang nilai capaian IKPA dibawah rata-rata; ✓ Terdapat reformulasi pembobotan pada beberapa indikator pada IKPA, salah satunya indikator capaian output, indikator tersebut

Keterangan :

- a. Sehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
- b. Nilai per indikator yang masih muncul pada halaman ini dapat digunakan untuk keperluan Pada level II IKU ini di cascading ke Level III (ke semua seksi/subbag) dengan perhitungan secara bulanan dengan indikator sebagai berikut :

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Triwulan IV Tahun 2021 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp Rp. 12.904.457.000,- yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 47. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2021

KODE	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	16.500.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.330.911.000
2339	Pengendalian Perizinan dan Kenelayanan	44.949.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	24.820.000
2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	8.667.189.000
TOTAL		12.084.369.000,-

Dari pagu anggaran tersebut diatas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program kegiatannya telah menargetkan sebesar Rp 12.084.369.000,- dengan realisasi capaian anggaran sebesar **Rp 11.940.808.587,-** atau **98,81%** dari jumlah pagu Tahun 2021.

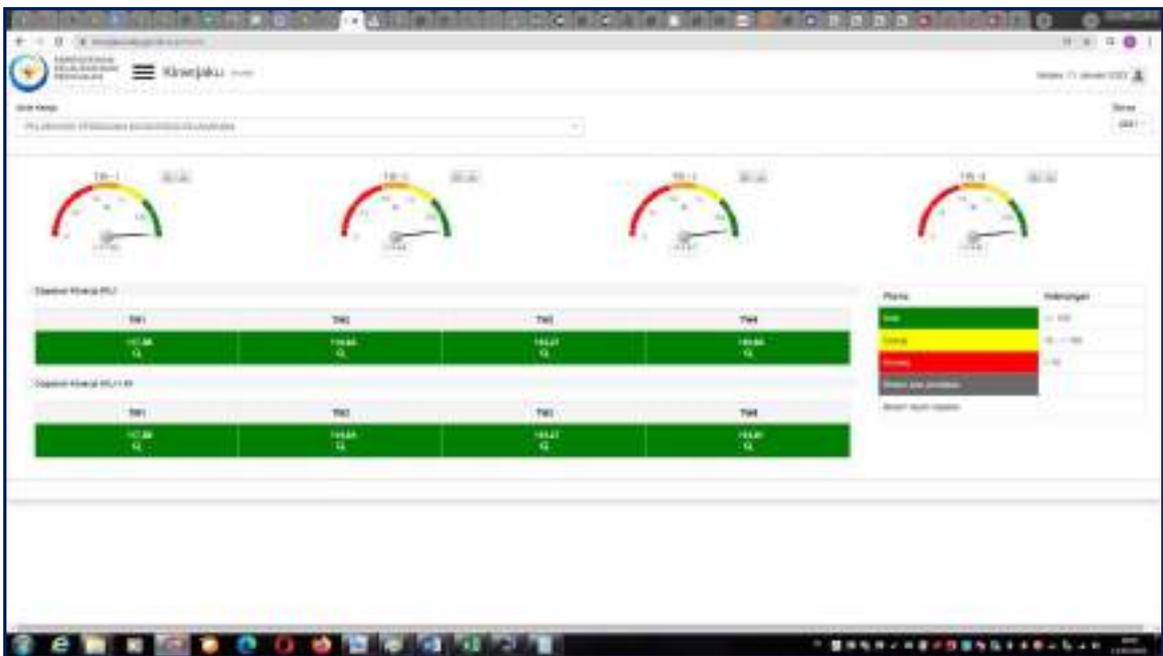
Tabel 49. Realisasi Keuangan PPN Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU/TARGET	REALISASI	%
1.	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	16.500.000	14.992.000	90,86
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya	16.500.000	14.992.000	90,86
2.	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.330.911.000	3.300.566.986	99,08
	ADC.001	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan	10.000.000	8.879.000	88,79
	BAH.001	Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan	291.417.000	283.729.105	97,36
	BGA.002	Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	289.430.000	277.259.252	95,79
	RBQ.001	Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (PEN)	2.740.064.000	2.730.699.629	99,65
3.	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayan	44.949.000	41.224.961	91,71
	QDC.004	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	4.000.000	2.500.000	62,50
	UBA.001	Sistem Perizinan Pusat-daerah Yang Terintegrasi	40.949.000	38.724.961	94,56
4.	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	24.820.000	22.313.867	89,90
	QKB.001	Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	24.820.000	22.313.867	89,90
5.	2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	8.667.189.000	8.561.710.773	98,78
	EAA	Layanan Perkantoran	8.305.689.000	8.215.357.744	98,91
	EAB.001	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	37.050.000	36.528.329	98,59
	EAD.002	Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	99.500.000	92.779.750	93,24
	EAF.003	Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	41.250.000	39.968.355	96,89
	EAH.003	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	46.000.000	43.964.524	95,57
	EAJ.001	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	9.900.000	9.223.849	93,17
	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	127.800.000	123.888.222	96,93

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan dukungan anggaran **Rp 12.084.369.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp 11.940.808.587,-** atau **98,81%** dari total pagu Tahun 2021. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **114,91%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerja pada Gambar 1)



Gambar 5. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan s/d Triwulan IV Tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan IV Tahun 2021 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator kinerja sebanyak 14 (empat belas) indikator sebagai berikut :

1. IK1 – Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap (orang)
2. IK2 – Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. Juta)
3. IK3 – Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan Yang Telah Dikumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (laporan)
4. IK4 – Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (ton)
5. IK5 – Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)
6. IK6 – Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
7. IK7– Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (orang)
8. IK8 – Persentase kapal perikanan yang berizin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
9. IK9 – IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (indeks)
10. IK10 – Nilai Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)
11. IK11 – Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)
12. IK12– Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
13. IK13– Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (persen)
14. IK15 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)

Selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu :

1. IK14 – Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (nilai)

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III diatas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Dalam penentuan IKU sebaiknya perlu dilakukan penyeragaman terhadap pengertian IKU tersebut, metode perhitungan serta penetapan targetnya agar dapat dilakukan serta dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- b) Perlu adanya penambahan jumlah SDM untuk mengikuti pelatihan, bimtek, diklat agar dapat lebih meningkatkan kompetensi sehingga akan mempengaruhi indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan IV Tahun 2021 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja dimasa yang akan datang.